



## Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

### Pengaruh PAD, DAU dan Investasi Swasta terhadap IPM dengan Belanja Langsung sebagai Variabel Intervening di Indonesia

Nurul Amalia Ramdan<sup>c</sup>, Siska Liana<sup>b</sup> Carolyn Lukita<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

Email: [nurul.amalia@fe.unsika.ac.id](mailto:nurul.amalia@fe.unsika.ac.id)<sup>a</sup>, [siska.liana@fe.unsika.ac.id](mailto:siska.liana@fe.unsika.ac.id)<sup>b</sup>, [carolyn.lukita@fe.unsika.ac.id](mailto:carolyn.lukita@fe.unsika.ac.id)<sup>c</sup>

#### INFO ARTIKEL

##### **Riwayat Artikel:**

*Received 13-01-2025*

*Revised 10-02-2025*

*Accepted 10-02-2025*

##### **Kata Kunci:**

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Investasi Swasta, Belanja Langsung, Indeks Pembangunan Manusia

##### **Keywords:**

*Local Revenue, General Allocation Fund, Private Investment, Direct Expenditures, Human Development Index*

#### A B S T R A K

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan investasi swasta terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja langsung pada 29 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD 2016-2018, laporan realisasi investasi PMDN dan PMA 2015-2018, laporan pencapaian IPM 2015-2018. Metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif merupakan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*), dengan menggunakan SPSS sebagai alat pengelolaan datanya. Hasil dari penelitian model pertama menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung, sedangkan secara simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Model kedua menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan Investasi Swasta tidak berpengaruh terhadap IPM. PAD, DAU, Investasi Swasta dan Belanja Langsung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila PAD, DAU dan Investasi Swasta mengalami peningkatan melalui Belanja Langsung maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di wilayahnya.

#### A B S T R A C T

*The purpose of this study was to determine the effect of local revenue, general allocation funds and private investment on the human development index through direct expenditures on 29 Province in Indonesia. This study uses secondary data sourced from the 2016-2018 APBD Realization Report, 2015-2018 PMDN and PMA investment realization reports, 2015-2018 HDI achievement reports. Descriptive research method verification with a quantitative approach is the research design used in this study. As the method for data analysis in this study using path analysis, using SPSS as a data management tool. The results of the first model study indicate that partially PAD and DAU have a positive and significant effect on Direct Expenditures, while simultaneously PAD and DAU have a significant effect on Direct Expenditures. The second model shows that partially direct expenditure has a positive and significant effect on the Human Development Index, while private investment has no effect on the Human Development Index. PAD, DAU, Private Investment and Direct*

*Expenditures simultaneously have a significant effect on the Human Development Index. Based on the results of the study, it shows that if PAD, DAU and Private Investment increase through Direct Expenditure, it will increase the Human Development Index in the region.*

---

@2025 Nurul Amalia Ramdan, Siska Liana, Carolyn Lukita  
Under The License CC BY-SA 4.0

---

## PENDAHULUAN

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Presiden Jokowi menyatakan bahwa “Pada tahun 2019 kita akan melakukan pergeseran strategi untuk masuk ke program pembangunan SDM secara besar-besaran. Untuk itu, saya minta semua menteri memasukan program ini dalam rencana kerja” (Ashari, 2017). Jokowi menambahkan, pertumbuhan jumlah usia produktif itu bisa menjadi kekuatan sekaligus masalah bila tidak diperhatikan dengan benar. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan sumber daya manusia mulai Tahun 2019 (Ashari, 2017).

Secara global hal tersebut dapat dilihat melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh negara-negara di dunia hingga tahun 2030. SDGs mencakup tujuh belas tujuan, dimana dari tujuh belas tujuan tersebut ada beberapa tujuan yang menyinggung tentang pembangunan manusia secara langsung. Untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional per kapita, indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif. UNDP mendefinisikan IPM sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat.

Selama periode tahun 2010 hingga tahun 2018 pembangunan manusia Indonesia terus mengalami peningkatan. IPM pada Negara Indonesia mengalami peningkatan dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,39 pada tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,88 persen per tahun. IPM Indonesia pada periode 2017–2018 tumbuh sebesar 0,82 persen. Namun apabila dibandingkan dengan negara lain Indonesia masih kalah bersaing. Indonesia menempati peringkat 6 (enam) dari 11 (sebelas) dalam regional Asia Tenggara. Indonesia memerlukan upaya keras untuk meningkatkan IPM Indonesia di tengah persaingan dengan negara ASEAN bahkan internasional. Indonesia harus segera bersiap diri menghadapi kondisi perekonomian global saat ini yang sedang berada pada puncak perubahan besar sebanding Revolusi Industri Pertama, Kedua dan Ketiga yaitu kita akan segera masuk ke satu tahapan revolusi industri yang dinamakan Revolusi Industri 4.0.

Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, seharusnya Indonesia mempersiapkan amunisi agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Indonesia merupakan salah satu dari negara yang mengadopsi tujuan pembangunan

berkelanjutan dalam strategi pembangunan nasionalnya. Hal ini merupakan komitmen positif untuk menggunakan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui sejumlah target pemerintah belum tercapai dalam lima tahun masa kepemimpinannya. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 salah satu target yang gagal terealisasi adalah tidak tercapainya target dari IPM di Negara Indonesia. Pemerintah menargetkan IPM mencapai 76,3. Namun pada tahun 2018 IPM Indonesia hanya sebesar 71,4 seperti yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Target Pemerintahan Presiden Jokowi Periode 2015-2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia berdasarkan hasil RPJMN 2015-2019 gagal mencapai targetnya. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh adanya kesenjangan capaian pembangunan manusia antar wilayah, sesuai dengan hal yang telah dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik dalam (Laporan BPS Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2015). Kesenjangan dalam pembangunan umat manusia pada daerah di tingkat provinsi masih relatif tinggi. Ketimpangan yang signifikan terlihat antara wilayah bagian timur dan wilayah bagian barat. Pada Tahun 2018, capaian IPM sebesar 60,06 oleh Provinsi Papua merupakan capaian yang terendah, sedangkan capaian IPM sebesar 80,47 oleh Provinsi DKI Jakarta merupakan capaian yang tertinggi.

Kunci kebijakan untuk meningkatkan kemajuan serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah harus berprinsip pada hakikat pembangunan manusia (BPS, 2014), Pemerintah Daerah seharusnya bisa mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, sebagai

contoh melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik, sebagai wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik (Yanto et al., 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja langsung. Kemampuan PAD yang berbeda antar wilayahnya dapat kembali menyebabkan kesenjangan sosial, oleh karena itu melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan yang sah. Tujuan DAU adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

Pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian khusus dalam bidang investasi swasta, karena untuk menggairahkan kemajuan pembangunan manusia (IPM), tidak cukup hanya mengandalkan pengeluaran pada sektor publik. Hal ini, mengingat kemampuan fiskal pemerintah yang sangat terbatas. Seperti apa yang dikatakan oleh (Tambunan, 2010), Kenaikan jumlah investasi akan menyebabkan sektor produktif bergerak, yang efeknya akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan Indeks Daya Beli yang bermuara pada peningkatan IPM (Si'lang et al., 2019).

Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPM pernah diteliti oleh (Si'lang et al., 2019) hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa variabel yang dianggap mempengaruhi IPM adalah: (1) PDRB sektor Pertanian, (2) Belanja Langsung Pemerintah, (3) Investasi swasta dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Suciati et al., 2015) mengungkapkan hasil penelitian yang sama bahwa dari hasil penelitian ini memberitahukan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, namun dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan investasi berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Awandari & Indrajaya, 2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja secara langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu terlihat bahwa hasil dari Pengaruh PAD, DAU terhadap IPM dengan Belanja Langsung sebagai variabel intervening masih mempunyai hasil yang berbeda-beda. Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, menyebabkan penelitian ini semakin menarik dan penting untuk dikaji, sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti kembali mengenai PAD, DAU, IPM, Belanja Langsung dan menambahkan variabel baru yaitu Investasi Swasta.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 1. *Goal Setting Theory*

Teori penetapan tujuan atau goal setting theory pada awalnya dikemukakan oleh Edwin Locke pada akhir 1960-an, yang menunjukkan hubungan antara penetapan tujuan dan kinerja. Goal setting theory awalnya menjelaskan apa yang menjadi penyebab beberapa individu tampil lebih baik didalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka, dibandingkan dengan sebagian individu lainnya. Terdapat perbedaan antara penerapan goal setting theory di sektor publik dan swasta. Aspek kunci yang membedakan sektor publik dan swasta adalah ambiguitas dan multiplisitas tujuan organisasi. Pemerintah biasanya berhadapan dengan banyak pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang memiliki tujuan berbeda sehingga mempersulit proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya (Chun & Rainey, 2005). Menurut hasil penelitian (Kusuma, 2013) ditemukan bahwa ketepatan anggaran dapat dipengaruhi oleh goal setting theory.

### 2. Perumusan Hipotesis

#### a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan menggali potensi pendapatan sendiri, yang memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. PAD dalam era otonomi daerah seharusnya merupakan basis utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin berkurang dan pada akhirnya daerah memiliki kekuatan dalam memenuhi segala kebutuhannya terkait dengan prosedur pelayanan publik (Yanto et al., 2018). PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Sarkoro & Zulfikar, 2016). Semakin besar PAD yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi (Haryanto, 2019). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Hidayah & Setiyawati, 2014) bahwa PAD akan cenderung meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam hal pengeluaran rutin dan modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia.

#### b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung

Dana Alokasi Umum berperan penting dalam mendanai kegiatan pemerintahan daerah, terutama dalam konteks otonomi daerah. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya (Suryani & Pariani, 2018). Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dana perimbangan yang diandalkan oleh pemerintah adalah DAU dimana melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah sehingga pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dana tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran yang bertujuan memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja langsung. Hal ini berarti semakin besar DAU

yang diterima oleh Pemerintah Daerah maka akan meningkatkan pengeluarannya juga melalui alokasi belanja langsung, hal ini sejalan yang diungkapkan oleh (Hidayah & Setiyawati, 2014) bahwa DAU dalam APBD meningkat akan meningkatkan belanja langsung.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia.

### **c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung**

Pendapatan Asli Daerah memberikan otonomi kepada daerah untuk menggali potensi pendapatan sendiri, sementara DAU berfungsi sebagai jaminan finansial yang membantu daerah, terutama yang memiliki keterbatasan sumber daya, untuk memenuhi kebutuhan belanja langsung. Peningkatan kedua sumber pendapatan ini akan berkontribusi pada peningkatan alokasi belanja langsung, yang esensial untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan adanya dana transfer dari pusat dalam bentuk DAU ini, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja di daerahnya (Suryani & Pariani, 2018). Ketergantungan yang berlebihan pada salah satu sumber pendapatan dapat mengurangi insentif bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan PAD dan DAU secara efektif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga belanja langsung dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

H3 : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia.

### **d. Pengaruh Belanja Langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan alokasi anggaran atas seluruh daya dan dana yang dimiliki daerah untuk meningkatkan seluruh kebutuhan pelayanan publik sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat, tentunya dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah pelayanan publik menyangkut sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang menjadi inti dari konsep pembangunan manusia (Si'lang et al., 2019). Sebuah studi di Kamerun oleh Emini & Fofack, 2004 dalam (Edeme et al., 2017) menggambarkan bahwa penurunan dramatis dalam pengeluaran publik selama periode krisis yang berlangsung selama periode pertumbuhan setelah devaluasi pada akhir 1990-an memiliki efek negatif kepada kesejahteraan masyarakat miskin dan membuat tingkat pengangguran yang tinggi di Kamerun, sedangkan (Bigsten & Levin, 2004) berpendapat bahwa komposisi pengeluaran pemerintah adalah penentu penting pertumbuhan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan manusia. Hal ini berarti pengeluaran publik telah mempengaruhi perkembangan manusia di negara-negara ini. Namun, tingkat pengaruhnya berbeda dari satu negara ke negara lain.

H4 : Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia.

### **e. Pengaruh Investasi Swasta terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa investasi swasta memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi, artinya bila suatu daerah investasinya rendah

maka tingkat pendapatan masyarakat perkapita dan pertumbuhan ekonominya juga rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi demikian sebaliknya (Todaro & Stephen, 2008). Dengan meningkatnya investasi, sektor-sektor produktif dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan daya beli dan akses masyarakat terhadap layanan dasar, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap IPM.

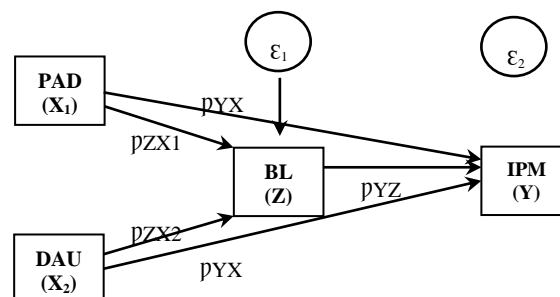
H5 : Investasi Swasta berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif merupakan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis pengaruh PAD, DAU, investasi swasta terhadap belanja langsung serta dampaknya terhadap IPM pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif primer. Data yang diperoleh berasal dari Laporan Realisasi APBD, Laporan realisasi penanaman modal PMDN dan PMA, Laporan capaian IPM setiap Pemerintah Daerah tingkat Provinsi.

Tahun data yang dipilih adalah Tahun 2016-2018 dikarenakan Indonesia secara resmi mengadopsi SDGs pada tahun 2016. Periode 2016-2018 memberikan gambaran awal tentang upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu IPM di Indonesia berdasarkan hasil RPJMN 2015-2019 gagal mencapai targetnya, Pemerintah menargetkan IPM mencapai 76,3, namun pada tahun 2018 IPM Indonesia hanya sebesar 71,4, oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih dalam mengapa Indonesia gagal mencapai target tersebut.

Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi. Dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling*, maka jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sejumlah 29 Provinsi. Penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*), dengan terlebih dahulu menguji asumsi klasik yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Model diagram jalur digunakan berdasarkan variabel yang diteliti, dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah PAD (X1), DAU (X2), Investasi Swasta (X3), IPM (Y) dan Belanja Langsung (Z). Berikut diagram jalur yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Jalur (Path Diagram)

Di samping menggunakan diagram jalur untuk menyatakan model yang di analisis, dalam analisis jalur juga dapat ditampilkan dalam bentuk persamaan yang biasa disebut persamaan sub struktural. Persamaan sub struktural menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis sebagai berikut:

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$$Z = PZX_1 + PZX_2 + e_1$$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$$Y = PYX_1 + PYX_2 + PYX_3 + PYZ + e_2$$

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Jalur Sub-struktur 1

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh PAD, DAU dan investasi swasta terhadap IPM melalui belanja langsung. Sebelum melakukan perhitungan koefisien jalur untuk sub-struktur 1, maka dilakukan perhitungan koefisien korelasi antar variabel. Koefisien korelasi antara variabel penelitian dapat diperoleh dengan mengolah data penelitian menggunakan SPSS. Hasil ini dimasukkan dalam tabel matriks yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Koefisien Korelasi antar Variabel

Correlations		
	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	29
Dana Alokasi Umum	Pearson Correlation	-.683**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	29

\*\*, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil pengolahan data PAD (X1) dan DAU (X2) terhadap Belanja Langsung (Z) pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi diperoleh nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi serta kontribusi variabel lain pada sub-struktur satu sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Model Summary Sub-Struktur 1

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.683 <sup>a</sup>	.466	.425	.13140

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Langsung

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil pengolahan data bahwa nilai koefisien korelasi (R) pada variabel PAD (X1) dan DAU (X2) dengan variabel terikat Belanja Langsung (Z) yaitu sebesar 0.683. Besar hubungan tersebut termasuk dalam hubungan yang kuat antara variabel PAD (X1) dan DAU (X2) dengan variabel terikat Belanja Langsung (Z). Adapun koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0.466. Dengan demikian koefisien determinasi pengaruh PAD (X1) dan DAU (X2) dengan variabel terikat Belanja Langsung (Z) ada sebesar 46,60%, sedangkan



sisanya sebesar 53,40% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Berikut akan disajikan pengujian hipotesis baik secara parsial menggunakan uji t maupun secara simultan dengan menggunakan uji F:

Tabel 3. Hasil Anova Sub-Struktur 1

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.392	2	.196	11.342	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.449	26	.017		
	Total	.841	28			

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

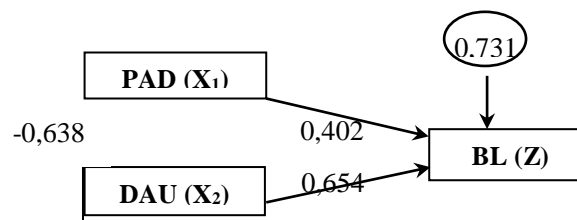
b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Tabel 4. Hasil Koefisien Variabel Sub-Struktur 1

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.251	.310		7.255	.000
	PAD	.166	.061	.402	2.723	.011
	DAU	.243	.055	.654	4.439	.000

a. Dependent Variable: Belanja Langsung

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS, koefisien jalur yang terdapat pada tabel diatas dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram jalur seperti disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. Diagram Jalur Sub Struktur 1

Dengan demikian dapat diperoleh persamaan struktural untuk sub-struktur 1 sebagai berikut:

$$Z = PZX1 + PZX2 + e1$$

$$Z = 0,402 X1 + 0,654 X2 + 0.731$$

$$\text{Dimana } R^2 = 0,466$$

## Analisis Jalur Sub-struktur 2

Hasil pengolahan data PAD (X1), DAU (X2), Investasi Swasta (X3) terhadap IPM melalui Belanja Langsung (Z) pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi diperoleh nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi serta kontribusi variabel lain pada sub-struktur satu sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Model Summary Sub-Struktur 2

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 <sup>a</sup>	.455	.364	.10271

a. Predictors: (Constant), Belanja Langsung, PAD, Investasi Swasta, DAU

b. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil pengolahan data bahwa nilai koefisien korelasi (R) pada variabel PAD (X1), DAU (X2), Investasi Swasta (X3) dan Belanja Langsung (Z) dengan variabel terikat IPM (Y) yaitu sebesar 0.675. Besar hubungan tersebut termasuk dalam hubungan yang kuat antara variabel PAD (X1), DAU (X2), Investasi Swasta (X3) dan Belanja Langsung (Z) dengan variabel terikat IPM (Y). Adapun koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0.455. Dengan demikian koefisien determinasi pengaruh PAD (X1), DAU (X2), Investasi Swasta (X3) dan Belanja Langsung (Z) dengan variabel terikat IPM (Y) adalah sebesar 45,50%, sedangkan sisanya sebesar 54,50% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Untuk menguji pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat yang dijelaskan oleh persamaan jalur diatas, berikut akan disajikan pengujian hipotesis baik secara parsial menggunakan uji F maupun secara parsial dengan menggunakan uji t yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Anova Sub-Struktur 2

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.211	4	.053	5.010	.004 <sup>b</sup>
	Residual	.253	24	.011		
	Total	.465	28			

a. Dependent Variable: IPM

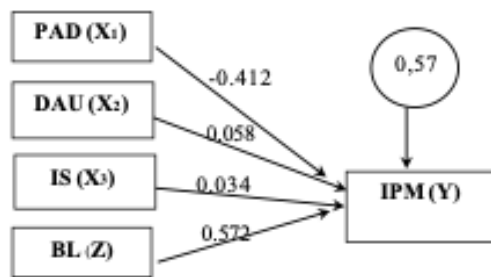
b. Predictors: (Constant), Belanja Langsung, PAD, Investasi Swasta, DAU

Tabel 7. Hasil Koefisien Variabel Sub-Struktur 2

Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.909	.428		-13.797	.000
	PAD	-.127	.055	-.412	-2.293	.031
	DAU	.016	.057	.058	.281	.781
	Investasi Swasta	.007	.036	.034	.193	.848
	Belanja Langsung	.426	.165	.572	2.583	.016

a. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS, koefisien jalur yang terdapat pada tabel diatas dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram jalur seperti disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4. Diagram Jalur Sub Struktur 2

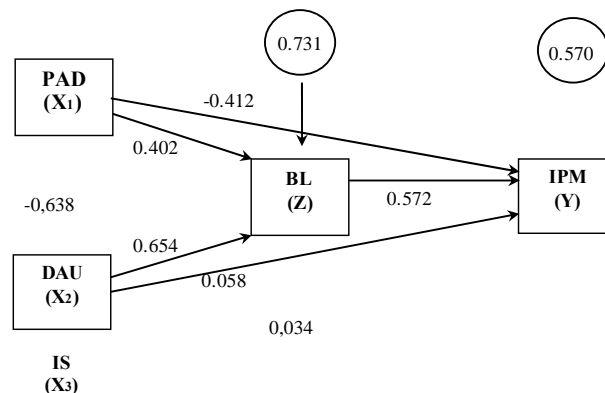
Dengan demikian dapat diperoleh persamaan struktural untuk sub-struktur 2 sebagai berikut:

$$Y = PYX1 + PYX2 + PYX3 + PYZ + e2$$

$$Y = -0,412 X1 + 0,058 X2 + 0,034 X3 + 0,572 ZY + 0,570$$

$$\text{Dimana } R^2 = 0,455$$

Berdasarkan seluruh koefisien jalur dari hubungan kausalitas yang ada, dapat diketahui Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung dari setiap variabel yang diteliti. Berikut ini hasil tersebut dari masing masing variabel sebagai berikut:



Gambar 5. Diagram Jalur Hasil Penelitian

Berdasarkan gambar diatas, Pengaruh langsung variabel X1 terhadap Z sebesar 0,402 (pengaruh total). Pengaruh langsung variabel X2 terhadap Z sebesar 0,654 (pengaruh total). Pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y sebesar 0,402, Pengaruh tidak langsung variabel X1 terhadap Y sebesar 0,230, sehingga Total pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah sebesar -0,191. Pengaruh langsung variabel X2 terhadap Y sebesar 0,654, Pengaruh tidak langsung variabel X2 terhadap Y sebesar 0,572, Sehingga total pengaruh variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 0,430. Pengaruh langsung variabel X3 terhadap Y sebesar 0,034. Pengaruh langsung variabel Z terhadap Y sebesar 0,572.  $\epsilon_1$  sebesar 0,731 menunjukkan koefisien pengaruh variabel lain diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi variabel Z.  $\epsilon_2$  sebesar 0,570 menunjukkan koefisien pengaruh variabel lain diluar penelitian ini

yang dapat mempengaruhi variabel Y.

### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung**

Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia dengan PAD cenderung memiliki belanja langsung yang lebih besar juga. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Haryanto, 2019), (Hidayah & Setiyawati, 2014), (Octaviani & Handayani, 2017), menyatakan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan dan juga positif terhadap Belanja Langsung.

### **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung**

Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja langsung pada provinsi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia yang menerima dana alokasi umum lebih besar cenderung memiliki belanja langsung yang lebih besar juga. Tujuan dari DAU adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintahan daerah termasuk Belanja Langsung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Suciati et al., 2015), (Haryanto, 2019), (Octaviani & Handayani, 2017), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung.

### **3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Secara Simultan Terhadap Belanja Langsung**

Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap belanja langsung pada provinsi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia jika PAD dan DAU mengalami peningkatan maka Belanja Langsung juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Haryanto, 2019), (Hidayah & Setiyawati, 2014), (Octaviani & Handayani, 2017) menyatakan bahwa secara simultan variabel PAD dan DAU berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Langsung.

### **4. Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa belanja langsung berpengaruh positif terhadap IPM. Hasil penelitian ini memberikan bukti

secara empiris bahwa Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia yang memperoleh belanja langsung yang lebih besar cenderung akan meningkatkan capaian IPM juga. Bigsten & Levin (2004) berpendapat bahwa komposisi pengeluaran pemerintah adalah penentu penting pertumbuhan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan manusia. Hal ini berarti pengeluaran publik telah mempengaruhi perkembangan manusia di negara-negara ini. Namun, tingkat pengaruhnya berbeda dari satu negara ke negara lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian ((Si'lang et al., 2019), menyatakan bahwa Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

### **5. Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa variabel X3 yaitu Investasi Swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Sumanto, 2016) menyimpulkan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bidang – bidang investasi di Jawa Timur bergeser dari bidang padat karya ke bidang padat modal. Karena bergeser ke bidang padat modal, efek penyerapan tenaga kerja menjadi sedikit per modal yang dikeluarkan. Penyerapan tenaga kerja yang sedikit menyebabkan efek kemakmuran yang semakin sedikit. Lalu (Awandari & Indrajaya, 2016) menyatakan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, hal tersebut dapat terjadi jika kegiatan investasi yang ada, adalah investasi portofolio yang hanya melibatkan aset – aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, sehingga tidak ada penyerapan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. (Awandari & Indrajaya, 2016) menambahkan infrastruktur dan investasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

### **6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Investasi Swasta Secara Simultan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan investasi swasta secara simultan berpengaruh terhadap IPM pada provinsi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia jika Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Investasi Swasta mengalami peningkatan maka melalui Belanja Langsung akan meningkatkan IPM di wilayahnya.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel PAD, DAU terhadap Belanja Langsung, secara simultan antara PAD dan DAU terhadap Belanja Langsung. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Belanja Langsung terhadap IPM, sedangkan antara variabel Investasi Swasta terhadap IPM terdapat pengaruh negatif dan signifikan. Adapun hasil uji hipotesis secara simultan mendapatkan hasil bahwa PAD, DAU dan Investasi Swasta berpengaruh secara simultan terhadap IPM dengan Belanja Langsung sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi di Indonesia.

### Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, terdapat beberapa saran dari peneliti yang diharapkan bermanfaat. Adapun saran yang diberikan, antara lain: Diperlukan usaha untuk meningkatkan penerimaan PAD yaitu melalui usaha intensifikasi dalam pemungutannya, dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dimana potensinya dimungkinkan untuk dipungut pajak, namun perlu tetap diperhatikan juga kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah melalui peraturan daerah (PERDA) pajak dan retribusi dengan tetap melihat kemampuan daerahnya sendiri agar tidak mencedarai masyarakatnya sendiri. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerjasama dengan Pemerintah Daerah harus menerbitkan juga peraturan bagi para pelaku usaha untuk mengadakan program CSR yang bisa langsung dirasakan masyarakat sekitar, program-program yang dimaksud harus berfokus pada bidang penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan.

### Keterbatasan

Dalam penelitian ini, keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah menggunakan data dengan periode tahun yang sama, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan selang waktu atau *lag time*, karena berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih terdapat beberapa perbedaan dalam pemilihan periode waktu, ada yang menggunakan selang waktu dan adapun yang tidak, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil/output yang berbeda.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, M. (2017). (2019), *Pembangunan SDM Akan Dilakukan Besar-besaran*. [www.Pikiran-Rakyat.Com](http://www.Pikiran-Rakyat.Com).
- Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal EP Unud*, 1435–1462.
- Bigsten, A., & Levin, J. (2004). Growth, Income Distribution, and Poverty: A Review. In *Growth, Inequality, and Poverty: Prospects for Pro-poor Economic Development* (Issue February 2014)
- Chun, Y. H., & Rainey, H. G. (2005). Goal ambiguity and organizational performance in U.S. federal agencies. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(4), 529–557. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui030>
- Edeme, R. K., Nkalu, C. N., & Ifelunini, I. A. (2017). Distributional impact of public expenditure on human development in Nigeria. *International Journal of Social Economics*.
- BPS. (2014). *Indeks Pembangunan Manusia 2014*. [www.bps.go.id/id](http://www.bps.go.id/id)
- Haryanto, F. Y. R. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi

- Khusus (Dak), Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Hidayah, N., & Setiyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 01, Januari 2014: 45-58, XVIII(01)*, 45–58.
- Octaviani, N. E., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2, 6*.
- Kusuma, D. M. (2013). Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sarkoro, H., & Zulfikar. (2016). Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2010), 54–63.
- Si'lang, I. L. S., Hasid, Z., & Priyagus. (2019). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 159–169.
- Suciati, D. A. P., Budhi, M. K. S., & Jayastra, K. (2015). Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Langsung pada Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2012. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol. 20 84 No. 2, 20(2)*, 83–93.
- Sumanto, A., & Effendie. (2015). The Effect of Government Capital Expenditure and Private Investment on Social Welfare. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(14), 202–215.
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 11–22.
- Tambunan, M. (2010). *Menggagas perubahan pendekatan pembangunan:menggerakkan kekuatan lokal dalam globalisasi ekonomi*. Graha Ilmu.
- Todaro, M. P., & Stephen, C. S. (2008). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 249 (2004).
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*.
- Yanto, E., Ridwan, & Fattah, V. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) ( Survei Pada Kabupaten / Kota di Sulawesi Tengah ). *Jurnal Katalogis*, 6, 125–135.